

Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme yang Mengarah pada Terorisme

Ferdy leorocho¹ Pujo Widodo² Achmed Sukendro³ Herlina Juni Risma Saragih⁴ Panji Suwarno⁵

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: leorochoferdy@gmail.com

Abstrak

Isu radikalisme dan terorisme semakin menjadi perhatian di masyarakat, terutama dengan adanya serangkaian aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara. Dalam menghadapi isu tersebut, membangun kesadaran bela negara merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Kesadaran bela negara dapat diartikan sebagai kesadaran individu atau masyarakat dalam menjaga keutuhan negara dan menghadapi ancaman terorisme dengan cara yang lebih efektif. Artikel ini membahas mengenai pentingnya membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu-isu radikalisme yang mengarah pada terorisme. Selain itu, artikel ini juga membahas beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara, seperti pendidikan nasionalisme, penguatan karakter bangsa, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Diharapkan dengan meningkatkan kesadaran bela negara, masyarakat dapat lebih siap dan mampu menghadapi ancaman terorisme dan membangun negara yang lebih kuat dan stabil.

Kata Kunci: Kesadaran Bela Negara, Radikalisme, Terorisme

Abstract

The issue of radicalism and terrorism is increasingly becoming a concern in society, especially with the series of acts of terrorism that occurred in several countries. In dealing with these issues, building awareness of state defense is one of the solutions that can be done. State defense awareness can be defined as the awareness of individuals or communities in maintaining the integrity of the state and facing the threat of terrorism in a more effective way. This article discusses the importance of building state defense awareness in dealing with issues of radicalism that lead to terrorism. In addition, this article also discusses several strategies that can be done to increase state defense awareness, such as nationalism education, strengthening national character, and active participation in social activities. It is hoped that by increasing state defense awareness, people can be better prepared and able to face the threat of terrorism and build a stronger and more stable country.

Keywords: State Defense Awareness, Radicalism, Terrorism



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Terorisme dan radikalisme adalah ancaman global yang mempengaruhi keamanan nasional dan internasional. Terorisme dan radikalisme bisa memicu konflik antar negara dan antar masyarakat, sehingga perlu penanganan yang serius. Terorisme dan radikalisme seringkali terkait dengan ideologi yang melawan sistem dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, membangun pandangan untuk bela negara dirasa perlu untuk melawan ancaman tersebut. Dengan pandangan rasa bela negara bukan saja hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah, itu menjadikan masyarakat sebagai bagian dari negara yang harus memiliki rasa nasionalisme serta memiliki rasa yang bertanggung jawab terhadap menjaga keamanan dan kedaulatan negara (Endro: 2019).

Tujuan penulisan jurnal dengan judul “Membangun Kesadaran Bela Negara dalam Menghadapi Isu-isu Radikalisme yang mengarah pada tindakan Terorisme” adalah dimaksudkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman yang luas berkenaan pentingnya kesadaran bela negara dalam menghadapi masalah terorisme dan radikalisme. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan kesadaran bela negara untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan mencegah tindakan terorisme dan radikalisme.

Ruang lingkup pembahasan jurnal “Bagaimana Membangun Kesadaran Bela Negara dalam Menghadapi Isu-isu Radikalisme yang mengarah pada tindakan Terorisme” meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Pentingnya kesadaran bela negara dalam menghadapi masalah terorisme dan radikalisme.
2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan terorisme dan radikalisme, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
3. Dampak media dan teknologi terhadap penyebaran ideologi terorisme dan radikalisme.
4. Diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran bela negara dan mencegah tindakan terorisme serta radikalisme, seperti melalui pendidikan, pengembangan toleransi, pemberantasan jaringan terorisme, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain dalam membangun kesadaran bela negara dan mengatasi isu-isu terorisme dan radikalisme.

Dengan demikian, jurnal ini membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam konteks keamanan nasional Indonesia, dan memberikan pandangan yang komprehensif dan holistik tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah terorisme dan radikalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Creswell berpendapat dalam penelitian kualitatif, dianggap bahwa realitas tidaklah tunggal dan objektif, melainkan tercipta bersama oleh individu yang terlibat dalam situasi penelitian. Terdapat beberapa jenis realitas yang hadir dalam situasi tertentu, dan setiap individu membentuk pemahaman dan pengalaman pribadi mereka terhadap realitas tersebut (Creswell: 2013). Dengan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik ini, dapat membantu memperdalam pemahaman kita tentang realitas yang tercipta bersama dalam penelitian kualitatif. "Dalam penelitian ini, metode kualitatif literatur digunakan karena topik penelitian terkait dengan kesadaran bela negara dan isu-isu terorisme yang berhubungan dengan radikalisme. Melalui metode ini, literatur dapat digunakan sebagai sumber data yang beragam dan mencakup perspektif yang berbeda-beda tentang topik penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan detail tentang topik penelitian yang diteliti." (Rifa'i, 2021)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Terorisme

Terorisme secara definisi dijelaskan menurut Eaton (2016) definisi tersebut menjelaskan bahwa tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap warga sipil atau sasaran lainnya digunakan untuk mencapai tujuan politik, ideologis, serta agama. Kemudian menurut Endro (2019), ialah menggambarkan bahwa terorisme merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dengan tujuan memaksa pemerintah atau masyarakat untuk memenuhi tuntutan mereka. untuk mengubah kebijakan atau praktek yang

dianggap merugikan kelompok atau individu tersebut. Begitupun yang di jelaskan oleh Borum (2014) yang merujuk jika terorisme merupakan tindakan dengan melakukan kekerasan oleh kelompok maupun individu tertentu dengan tujuan menciptakan ketakutan dan mengintimidasi masyarakat untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama.

Sehingga dari ketiga definisi di atas, terorisme merupakan gerakan fisik dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain baik kelompok maupun individu tertentu dengan tujuan politik, ideologis, atau agama, yang ditujukan juga dengan paksaan serta diintimidasi yang dilakukam oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai tujuannya. Tindakan terorisme biasanya ditujukan kepada sasaran yang tidak berkepentingan langsung dengan konflik yang terjadi, seperti warga sipil, infrastruktur, atau gedung-gedung publik.

Pengertian Radikalisme

Radikalisme adalah pandangan atau tindakan yang bertentangan pada suatu aturan dan kebiasaan yang menjadi norma oleh mayoritas penduduknya. Radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan ekstrem, baik dalam hal politik, sosial, ekonomi, atau agama (Karaca & Arslan: 2021). Selain itu menurut Sedwick (2010) dalam bukunya menjelaskan bahwa radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan kekerasan atau tindakan ekstremisme yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki pandangan atau tujuan yang bertentangan dengan mayoritas masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua radikalisme berujung pada kekerasan dan ekstremisme, dan bahwa terdapat perbedaan antara radikalisme dan terorisme. Namun menurut Q. Wiktorowics (2014), radikalisme di kalangan Muslim sering kali diidentifikasi dengan pandangan yang ekstrem dan bertentangan dengan mayoritas masyarakat. Radikalisme Islam dapat diidentifikasi dengan pandangan yang ingin menegakkan sistem hukum syariah atau menggulingkan pemerintahan tidak sejalan dengan kebenaran ajaran Islam. Sehingga perlu di garis bawahi bahwa pandangan tentang radikalisme dapat berbeda-beda tergantung pada penulis dan konteksnya. Namun, secara umum, radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan ekstrem atau pandangan bersebrangan serta kebiasaan warga yang ada.

Hubungan Antara Terorisme dan Radikalisme

Terorisme dan radikalisme memiliki hubungan yang erat karena terorisme seringkali dipraktekkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki ideologi radikal. Radikalisme dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan adanya perubahan kosep dari sosial atau politik secara cepat dan ekstrem yang biasanya melanggar nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Hafez (2007), radikalisme dan terorisme memiliki hubungan yang kompleks. Radikalisme dapat dianggap sebagai tahap awal dari proses yang memunculkan tindakan terorisme, namun tidak semua individu atau kelompok radikal akan menjadi pelaku terorisme. Secara umum, radikalisme mencerminkan sebuah sikap atau pandangan yang ekstrem dan mencari perubahan sosial atau politik dengan cara yang kontroversial atau di luar norma. Sementara itu, tindakan terorisme ialah suatu sikap dengan kekerasan dilakukan dan ditujukan kepada masyarakat umum serta pemerintah dengan tujuan politik atau ideologi tertentu. Pelaku terorisme sering kali memiliki pandangan yang radikal dan memilih tindakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ideologi radikal seringkali merasa bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan kekerasan dan aksi teror, mereka dapat memaksa pemerintah atau masyarakat untuk memenuhi tuntutan mereka. Inilah yang menyebabkan seringkali terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki ideologi radikal.

Namun menurut pendapat Azani dan Saputra (2019) yang menyatakan bahwa terorisme dan radikalisme terkait erat karena terorisme sering kali dihasilkan dari pemikiran atau pandangan radikal. Mereka juga menekankan bahwa radikalisme dan terorisme bukan saja terjadi di luar tetapi juga di dalam negeri. Dengan itu, dibutuhkan cara dalam mencegah radikalisme agar tidak berkembang menjadi tindakan terorisme yang merugikan masyarakat. Sehingga dengan demikian, tidak semua kelompok radikal melakukan aksi terorisme. Banyak kelompok radikal yang menggunakan cara-cara lain untuk mencapai tujuan mereka, seperti mengajukan petisi, memobilisasi massa, atau mendirikan partai politik. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara radikalisme dengan tindakan kekerasan atau terorisme.

Sehingga dalam konteks pencegahan terorisme, penting untuk memahami hubungan antara terorisme dan radikalisme karena upaya pencegahan terorisme juga harus melibatkan pencegahan radikalisme. Pencegahan radikalisme dilakukan untuk mengurangi jumlah orang yang terpapar dengan ideologi radikal yang dapat memicu terorisme di masa depan.

Kebijakan perundangan-undangan

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memerangi bahaya terorisme dengan menerbitkan undang-undang baru, yaitu pada Undang undang nomor 5 tahun 2018. Ini adalah perubahan atas undang-undang sebelumnya yakni UU nomor 15 tahun 2003 ditetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Terdapat beberapa poin penting dalam isi undang-undang pemberantasan terorisme terbaru ini, antara lain:

1. Dalam rangka membedakan kejahatan terorisme dengan tindak pidana lain yang memiliki akibat serupa, diperlukan penegasan definisi terorisme yang jelas sehingga lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi dengan tepat.
2. Terdapat perluasan kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme, yang mencakup bagi siapa yang terlibat organisasi teroris dan dengan sengaja menyebar gagasan dengan maksud untuk memprovokasi agar mengikutinya.
3. Perluasan kriminalisasi terhadap personil atau orang yang ikut dalam tindakan persiapan seperti pelatihan militer dan paramiliter. Selain itu, ada perluasan terhadap penggunaan alat atau senjata untuk melakukan tindakan terorisme yang juga merupakan tindakan yang dikenai sanksi pidana.
4. Dalam upaya pemberantasan terorisme, undang-undang pemberantasan terorisme terbaru memberlakukan hukuman berat untuk terorisme, termasuk untuk kasus percobaan dan pembantu untuk melakukan tindakan terorisme.
5. Terdapat perluasan sanksi pidana yang berlaku untuk korporasi, dan sanksi tersebut juga dapat dikenakan pada pelopornya.
6. Undang-undang pemberantasan terorisme terbaru memperkenalkan hukuman tambahan dengan melakkan tindakan administrasi kewarganegaraan.
7. Dalam upaya untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, pemberantasan tindakan terorisme terbaru memberikan tambahan waktu dalam peroses penyidikan.
8. Undang-undang pemberantasan terorisme menetapkan bahwa pencegahan dan/atau penanggulangan terorisme dan kewenangan, tugas bagi semua instansi tersebut harus bekerja sama serta mengkoordinasikan oleh suatu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
9. Undang-undang pemberantasan terorisme juga mengatur tentang kelembagaan BNPT, pengawasan terhadapnya, dan keterlibatan peran Tentara Nasional Indonesia, dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Pembahasan

Data Kejadian Terorisme di Indonesia

Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa kasus terorisme yang sangat merugikan bagi keamanan dan stabilitas nasional. Isu terorisme ini sangat erat kaitannya dengan radikalisme yang sering kali menjadi pemicu dari aksi-aksi teror tersebut. Terorisme merupakan ancaman global yang mempengaruhi keamanan nasional dan internasional. Radikalisme dan terorisme bisa memicu konflik antar negara dan antar masyarakat, sehingga perlu penanganan yang serius. Radikalisme dan terorisme seringkali terkait dengan ideologi yang melawan sistem dan nilai-nilai kebangsaan. Beberapa peristiwa terorisme yang telah terjadi di Indonesia antara lain:

Tabel 1. Data Kejadian Terorisme di Indonesia

No	Kejadian Terorisme	Tahun
1	Pada tanggal 28 Maret 1981, terjadi pembajakan pesawat Garuda Indonesia Penerbangan 206 yang berangkat dengan rute Palembang ke Medan dengan pesawat DC-9 Woyla. Kelima pelaku teroris menyamar sebagai penumpang dan berhasil membajak pesawat tersebut.	1981
2	Peristiwa terorisme yang terjadi pada tanggal 21 Januari 1985 di Candi Borobudur adalah peristiwa terorisme kedua di Indonesia yang bermotif "jihad".	1985
3	Beberapa kejadian terorisme di Indonesia antara lain: pengeboman Kedubes Filipina pada tanggal 1 Agustus 2000, pengeboman Kedubes Malaysia pada tanggal 27 Agustus 2000, pengeboman BEJ pada tanggal 13 September 2000, dan pengeboman pada malam Natal pada tanggal 24 Desember 2000.	2000
4	Beberapa kejadian terorisme di Indonesia antara lain: serangan bom di Gereja Santa Anna dan HKBP pada 22 Juli 2001, bom di Plaza Atrium Senen Jakarta pada 1 Agustus 2001, bom di restoran KFC di Makassar pada 12 Oktober 2001, serta bom di sekolah Australia Jakarta pada 6 November 2001.	2001
5	Serangan Bom Tahun Baru pada 1 Januari 2002, Serangan Bom di Bali pada 12 Oktober 2002, dan Serangan Bom di restoran McDonald's Makassar pada 5 Desember 2002.	2002
6	Serangan bom di Kompleks Mabes Polri, Jakarta pada tanggal 3 Februari 2003, serangan bom di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada tanggal 27 April 2003, serta serangan bom di Hotel JW Marriott pada tanggal 5 Agustus 2003	2003
7	Serangan bom di Palopo pada tanggal 10 Januari 2004, pengeboman di Kedutaan Besar Australia pada tanggal 9 September 2004, serta ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Desember 2004.	2004
8	Ledakan bom di Pamulang, Tangerang pada tanggal 8 Juni 2005. Bom Bali meledak kembali pada tanggal 1 Oktober 2005. Pasar Palu menjadi sasaran bom pada tanggal 31 Desember 2005.	2005
9	Pada tanggal 17 Juli 2009, terjadi dua ledakan besar di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta, yang dikenal sebagai peristiwa bom Jakarta	2009
10	Penembakan terhadap warga sipil di Aceh pada Januari 2010, perampokan bank CIMB Niaga pada September 2010.	2010
11	Periode 15 Maret hingga 17 Maret 2011, terjadi serangan teror bom buku di Jakarta. Terdapat pula peristiwa bom Cirebon pada 15 April 2011, yaitu ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon. Kemudian, terjadi bom Solo pada 25 September 2011, yaitu ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah.	2011
12	Bom Solo pada tanggal 19 Agustus 2012 terjadi ketika granat meledak di Pospam Gladak, Solo, Jawa Tengah. Kemudian pada 17 September 2012 terjadi Bom Grand Indonesia di pasar Food Hall di lantai basement mall Grand Indonesia, Jakarta.	2012
13	Pada tanggal 9 Juni 2013, terjadi serangan bom di Polres Poso dengan target personel polisi yang sedang apel pagi, di mana bom meledak di depan Masjid Mapolres Poso, Sulawesi Tengah.	2013
14	2 / 2	
14	Ledakan dan baku tembak di sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat terjadi pada 14 -01- 2016. Pada tanggal 5 -07- 2016, terjadi ledakan bom bunuh diri di halaman Markas Kepolisian Resor Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pada 28 -08- 2016, sebuah ledakan	2016

	bom bunuh diri terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Kota Medan, Sumatra Utara. Pada 13 -11- 2016, sebuah bom molotov meledak di depan Gereja Oikumene Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada 14 -11- 2016, sebuah bom molotov meledak di Vihara Budi Dharma, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.	
15	Ledakan bom panci terjadi di Taman Pandawa Cicendo, Bandung pada 27 -02- 2017, dan di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada 24 -05- 2017.	2017
16	Kerusuhan terjadi di Mako Brimob pada tanggal 8-10 Mei 2018 ketika sekelompok 156 narapidana terorisme menawan sejumlah anggota Brimob dan Densus 88 selama 36 jam di Kelapa Dua, Depok. Pada tanggal 13-14 Mei 2018, terjadi serangkaian bom di Surabaya. Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2018, kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menyerang Mapolda Riau.	2018
17	Terjadi ledakan bom di Sibolga pada tanggal 12-13 -03- 2019. Pada tanggal 10 -10- 2019, Menkopolhukam Wiranto diserang dengan senjata tajam saat melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Banten. Terjadi ledakan bom di Medan pada tanggal 13 -11- 2019	2019
18	Pada tanggal 1 -06- 2020 terjadi penyerangan terhadap Polsek Daha Selatan, Pada tanggal 27 -11- 2020 terjadi serangan di Sigi dimana seorang keluarga dibunuh oleh kelompok teroris yang dipimpin oleh Ali Kalora dari Mujahidin Indonesia Timur.	2020
19	Pada tanggal 28 -03- 2021, terjadi ledakan bom bunuh diri di Makassar, Pada tanggal 31 -03- 2021, terjadi penembakan di Mabas Polri dimana pelaku menembak petugas jaga sebanyak enam kali.	2021

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia, 2021

Faktor-faktor yang Mendorong Terorisme dan Radikalisme

Faktor-faktor tersebut bisa dibagi menjadi faktor yang berasal dari dalam (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). Menurut A.S Hendro (2019). Faktor internal terkait dengan kondisi dan situasi dalam suatu negara, sementara faktor eksternal terkait dengan faktor-faktor di luar negara tersebut. Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor internal. Faktor internal yang mendorong terorisme dan radikalisme antara lain adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah dan lembaga negara, ketidakadilan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta kegagalan pemerintah dalam menangani masalah sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut dapat memicu rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang kemudian diarahkan ke tindakan radikal.
2. Faktor eksternal. Sedangkan faktor eksternal yang mendorong terorisme dan radikalisme antara lain adalah adanya dukungan dan pengaruh dari kelompok-kelompok teroris internasional, seperti Al-Qaeda, ISIS, dan lain-lain. Selain itu, faktor eksternal juga dapat berasal dari negara-negara tetangga yang sedang mengalami konflik, seperti di Filipina dan Timur Tengah.
3. Pengaruh media dan teknologi. Media dan teknologi juga memiliki pengaruh dalam mendorong terorisme dan radikalisme. Media dan teknologi dapat digunakan oleh kelompok-kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi dan propaganda mereka, serta merekrut anggota baru. Selain itu, media dan teknologi juga dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar kelompok teroris yang berbeda.

Dalam rangka untuk mengatasi terorisme dan radikalisme, perlu adanya upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan terorisme dan radikalisme, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun kesadaran bela negara dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Selain itu, pengawasan terhadap media dan teknologi juga perlu ditingkatkan untuk mencegah penyebaran propaganda dan ideologi yang radikal.

Dampak Terorisme dan Radikalisme bagi Negara

1. Dampak sosial. Terorisme dan radikalisme dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Dampak dari terorisme bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, terorisme dapat mengakibatkan banyak orang tewas dan terluka, serta menimbulkan rasa takut dan trauma pada masyarakat. Dampak tidak langsungnya, terorisme dapat memicu diskriminasi, intoleransi, dan konflik antar kelompok masyarakat. Selain itu, terorisme dan radikalisme juga dapat merusak citra negara di mata dunia internasional, sehingga berdampak pada hubungan internasional negara tersebut.
2. Dampak ekonomi. Dampak terorisme dan radikalisme juga dapat terjadi pada sektor ekonomi. Terorisme dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur dan sarana publik, serta menghambat aktivitas ekonomi. Selain itu, menurut Endro (2019) terorisme juga dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan yang dapat mempengaruhi arus investasi dan perdagangan internasional, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
3. Dampak politik. Dampak terorisme dan radikalisme pada sektor politik dapat mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan negara. Terorisme dan radikalisme dapat memicu polarisasi politik, meningkatkan ketegangan antar kelompok masyarakat, dan mengancam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Selain itu, dampak terorisme juga dapat memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang keras dan membatasi kebebasan individu, sehingga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia.

Membangun Kesadaran Bela Negara dalam Menghadapi Isu Terorisme dan Radikalisme

1. Pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa memegang peran penting dalam membentuk kesadaran bela negara dan menghadapi isu terorisme dan radikalisme. Pendidikan karakter diarahkan pada pembentukan kepribadian yang mencakup nilai-nilai luhur seperti cinta tanah air, toleransi, kejujuran, keadilan, dan sikap kritis. Pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan di semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan formal dan non-formal, dan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks menghadapi isu terorisme dan radikalisme, pendidikan karakter dapat membentuk pola pikir yang rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Melihat dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter dapat membentuk kesadaran bela negara yang kuat dan mengurangi kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan terorisme dan radikalisme. Sebuah studi yang dilakukan oleh Wijayanto dan Riyadi (2019) menunjukkan bahwa pendidikan karakter dapat membentuk pemikiran kritis dan reflektif pada siswa, sehingga mereka lebih dapat memahami dampak negatif dari terorisme dan radikalisme pada masyarakat.
2. Pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan merupakan upaya untuk membentuk karakter dan identitas nasional yang kuat pada masyarakat. Pendidikan kebangsaan menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kesadaran bela negara dalam menghadapi isu terorisme dan radikalisme. Dalam konteks pendidikan nasional, setiap individu yang merupakan warga negara harus memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan memiliki rasa patriotisme yang kuat terhadap negara. Menurut Hardi Warsono (2018) dalam buku "Pendidikan Kebangsaan", pendidikan kebangsaan dapat membantu membangun kesadaran bela negara dengan memberikan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, kesatuan, dan kerukunan. Selain itu, pendidikan kebangsaan juga harus memperkuat identitas nasional dan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara.

3. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi salah satu upaya dalam membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu terorisme dan radikalisme. Hal ini karena Pancasila dan UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar negara Indonesia dan dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya yang diusulkan adalah melalui pendidikan karakter yang berbasis Pancasila dan UUD 1945. Artikel ini mengemukakan bahwa dengan menguatkan pendidikan karakter bangsa, diharapkan akan tumbuh kesadaran bela negara yang kuat, sehingga masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah dan mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme. Ini ditekankan lebih menekankan bahwa pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini dan secara terus-menerus, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Arifin & Murniarti: 2021). Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti keyakinan pada satu Tuhan Yang Maha Esa, perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap sesama manusia, persatuan bangsa Indonesia, pemerintahan yang berdasarkan pada kesepakatan dan kebijaksanaan bersama, serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat, dapat membentuk karakter bangsa yang menghargai keragaman dan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Jurnal ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi strategi efektif dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan menjaga stabilitas keamanan nasional (Yuliadi & Rahayu: 2020). Sehingga dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sangat penting dalam membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu terorisme dan radikalisme. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan pluralisme dapat membentuk karakter bangsa yang toleran dan menghargai keberagaman, sehingga dapat menangkal ideologi radikal dan terorisme. Sedangkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dapat menjadi landasan hukum dalam menangani isu terorisme dan radikalisme. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter bangsa yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
4. Peran media massa dan sosial. Media massa dan sosial memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu terorisme dan radikalisme. Melalui media massa dan sosial, informasi dan pemahaman mengenai bahaya terorisme dan radikalisme dapat disebarluaskan ke masyarakat dengan lebih luas dan efektif. Selain itu, media massa dan sosial juga dapat membantu dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang berkaitan dengan bela negara dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memerangi terorisme dan radikalisme. Menurut Sulaiman dan Budiharto (2019) membahas bagaimana media sosial dapat memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran bela negara pada generasi muda Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana media sosial dapat mempercepat proses penyebaran informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam gerakan bela negara. Mereka juga menekankan pentingnya memanfaatkan media sosial dengan cara yang positif dan bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau bersifat provokatif.

Upaya Pemerintah dalam Membangun Kesadaran Bela Negara.

1. Kebijakan nasional dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme. Kebijakan nasional dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme menjadi sangat penting dalam upaya pemerintah dalam membangun kesadaran bela negara. Indonesia telah mengambil tindakan dalam mengatasi masalah terorisme dan radikalisme dengan cara membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. BNPT adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat koordinasi antara instansi terkait

dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mengatasi masalah terorisme dan radikalisme. Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga yang terlibat dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme, termasuk dengan negara-negara lain. Pemerintah juga gencar melakukan kampanye dan sosialisasi tentang bahaya terorisme dan radikalisme kepada masyarakat, serta melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan dan pembangunan karakter bangsa. Adanya kebijakan nasional yang kuat dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme menjadi penting dalam membangun kesadaran bela negara. Dengan kebijakan yang jelas dan terintegrasi, pemerintah dapat melakukan tindakan preventif dan responsif yang tepat guna melindungi keamanan dan kedaulatan negara serta mencegah terjadinya aksi terorisme dan radikalisme.

2. Pembentukan lembaga pemerintah terkait. Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa lembaga pemerintah terkait dalam upaya membangun kesadaran bela negara dan penanggulangan terorisme serta radikalisme. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam berbagai aspek, mulai dari intelijen, penegakan hukum, pendidikan, hingga pemulihan korban. Beberapa lembaga pemerintah terkait tersebut antara lain:
 - a. Badan Intelijen Negara (BIN) - lembaga yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen untuk menjaga keamanan nasional.
 - b. Kemenko Polhukam atau Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan, lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelaraskan kebijakan politik, hukum, dan keamanan.
 - c. BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan, lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia.
 - d. Komnas HAM, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab didalam memantau serta mengadvokasi HAM di Indonesia.
 - e. Kemendikbudristek merupakan, lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan karakter, termasuk pendidikan bela negara.
 - f. Kementerian Sosial (Kemensos) - lembaga yang bertanggung jawab dalam pemulihan korban terorisme dan radikalisme. Dengan adanya lembaga-lembaga pemerintah terkait tersebut, diharapkan dapat tercipta koordinasi yang baik dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme, serta pembangunan kesadaran bela negara.
3. Peningkatan kerjasama antar negara dalam menghadapi terorisme dan radikalisme. Peningkatan kerjasama antar negara dalam menghadapi terorisme dan radikalisme merupakan salah satu upaya yang penting dalam memerangi ancaman keamanan global. Terorisme dan radikalisme dapat menyebabkan kerusakan fisik dan ekonomi yang besar, serta merusak keamanan nasional dan internasional. Kerjasama antarnegara sangat penting dalam upaya menangani ancaman terorisme dan radikalisme adalah dengan melakukan pertukaran informasi antara lembaga-lembaga keamanan negara. Pertukaran informasi ini bisa berupa data intelijen, strategi penanganan, serta pengalaman dan pelajaran dari kasus-kasus terorisme dan radikalisme yang pernah terjadi. Dengan adanya pertukaran informasi ini, negara-negara dapat lebih siap menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme yang muncul. Selain itu, kerjasama antar negara dalam bidang keamanan dan pertahanan juga dapat dilakukan melalui latihan bersama, pengembangan teknologi keamanan, serta peningkatan kemampuan personel keamanan dalam menangani ancaman terorisme dan radikalisme. Upaya pemerintah dalam membangun kesadaran bela negara juga merupakan langkah penting dalam memerangi terorisme dan radikalisme. Meningkatkan kesadaran

bela negara dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negara. Semua ini dapat dilakukan dengan memperkuat pendidikan karakter dan nasionalisme pada masyarakat, mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, serta membentuk sikap yang menghargai keragaman budaya dan agama. Kemudian dari itu, pemerintah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran bela negara dengan melibatkan mereka dalam program-program yang bertujuan untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme. Misalnya, pemerintah dapat membangun komunitas yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban negara, serta memberikan pelatihan tentang cara mengidentifikasi tindakan terorisme dan radikalisme. Secara keseluruhan, peningkatan kerjasama antar negara dalam menghadapi terorisme dan radikalisme serta upaya pemerintah dalam membangun kesadaran bela negara adalah langkah yang penting dalam menjaga keamanan nasional dan internasional. Kita semua harus memahami bahwa ancaman terorisme dan radikalisme adalah ancaman yang harus diatasi bersama-sama, dan kerjasama dan kesadaran bela negara dapat menjadi kunci dalam memerangi ancaman ini.

Peran Masyarakat dalam Membangun Kesadaran Bela Negara.

1. Partisipasi masyarakat dalam gerakan bela negara. Peran masyarakat sangat penting dalam membantu membangun kesadaran bela negara karena masyarakat adalah elemen terdepan dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Partisipasi masyarakat dalam gerakan bela negara juga menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan nasional yang kuat dan terjaga. Contoh peran masyarakat dalam membantu membangun kesadaran bela negara adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan partisipasi dalam program-program bela negara yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Misalnya, program pelatihan pertahanan sipil, program pemberdayaan masyarakat, atau program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bela negara.
 - b. Dengan upaya dalam menjaga lingkungan untuk menciptakan keamanan. Masyarakat dapat membantu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau perilaku yang dapat mengancam keamanan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.
 - c. Melakukan kegiatan sosial dan gotong-royong untuk memperkuat solidaritas antar warga. Dalam kegiatan gotong-royong, masyarakat dapat saling membantu dan bersama-sama membangun lingkungan yang lebih baik dan aman.
 - d. Memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat dapat menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan budaya serta membangun kerjasama dan toleransi yang harmonis.
 - e. Memperluas wawasan tentang keamanan dan pertahanan negara. Masyarakat dapat membaca buku atau artikel yang membahas tentang pertahanan negara, memperhatikan berita terkait keamanan dan pertahanan negara, atau mengikuti seminar dan diskusi yang mengupas topik bela negara. Dalam rangka membangun kesadaran bela negara, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Melalui partisipasi masyarakat dalam gerakan bela negara, diharapkan dapat tercipta kebersamaan dan solidaritas antar warga untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia.
2. Pembentukan komunitas bela negara. Peran masyarakat dalam membangun kesadaran bela negara juga dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas bela negara. Komunitas bela negara merupakan sebuah kelompok yang beranggotakan warga masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara, serta siap mengambil tindakan dalam situasi darurat atau krisis yang mengancam

keamanan negara (Sihombing: 2017). Komunitas bela negara memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bela negara di masyarakat, diantaranya:

- a. Menjadi sarana untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam gerakan bela negara. Dalam komunitas bela negara, anggota dapat saling berdiskusi dan bertukar informasi mengenai situasi keamanan dan pertahanan negara, serta menentukan tindakan yang perlu diambil untuk menghadapi situasi darurat.
 - b. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan anggota dalam menghadapi situasi darurat yang mengancam keamanan negara. Melalui pelatihan-pelatihan dan latihan-latihan yang diselenggarakan dalam komunitas bela negara, anggota dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat.
 - c. Mendorong tumbuhnya nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Komunitas bela negara dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebanggaan dan cinta tanah air di kalangan anggotanya, serta memupuk solidaritas dan kesatuan di antara warga masyarakat.
3. Penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam keluarga. Penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam keluarga sangat penting dalam membangun kesadaran bela negara karena keluarga adalah institusi sosial pertama yang membentuk karakter dan sikap seseorang terhadap negara dan bangsa. Menurut Triwiyanto (2015), keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan kesadaran bela negara dan nilai-nilai kebangsaan, seperti cinta tanah air, keberagaman, toleransi, dan semangat gotong royong. Keluarga dapat memberikan pendidikan moral dan etika kepada anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap anak-anak terhadap kebangsaan dan negara. Dalam keluarga, anak-anak dapat diajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, toleransi, gotong-royong, dan menghargai perbedaan. Apabila menurut Suhartono (2016), keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter dan sikap anak terhadap negara. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan sangatlah penting. Orang tua dapat melakukan hal-hal seperti mengajarkan lagu kebangsaan, memperkenalkan budaya lokal, atau melibatkan anak dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan kebangsaan. Selain itu, penelitian oleh Hartono dan Adi (2019) juga menunjukkan bahwa pendidikan nilai-nilai kebangsaan yang diberikan di dalam keluarga berpengaruh positif terhadap sikap bela negara anak. Anak-anak yang dididik dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat cenderung memiliki kesadaran bela negara yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi isu-isu terorisme yang memiliki relasi dengan radikalisme, penting untuk membangun kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara dapat diartikan sebagai kesadaran akan pentingnya membela negara dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hal ini meliputi upaya untuk mempertahankan kedaulatan, integritas, dan keutuhan wilayah negara serta memperkuat ketahanan nasional. Untuk membangun kesadaran bela negara, peran masyarakat sangat penting, terutama dalam pembentukan komunitas bela negara yang dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui berbagai kegiatan dan program yang dapat dilakukan bersama-sama.

Selain itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam keluarga juga sangat penting dalam membangun kesadaran bela negara. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam membentuk karakter dan sikap anak terhadap negara. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membentuk sikap nasionalisme dan cinta tanah air pada anak sangat penting. Dalam

membangun kesadaran bela negara, perlu juga untuk memahami bahwa terorisme dan radikalisme bukan hanya masalah keamanan, namun juga masalah sosial dan psikologis. Oleh karena itu, upaya membangun kesadaran bela negara perlu dilakukan secara komprehensif melalui berbagai bidang, seperti pendidikan, budaya, sosial, dan politik. Dengan demikian, membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu-isu terorisme yang memiliki relasi dengan radikalisme merupakan upaya yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama. Hanya dengan meningkatkan kesadaran bela negara dan memperkuat ketahanan nasional, kita dapat menghadapi tantangan terorisme dan radikalisme dengan lebih efektif.

Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi yang harus dibangun didalam lingkungan masyarakat saat ini ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran. Membangun kesadaran bela negara adalah langkah penting dalam menghadapi isu-isu terorisme dan radikalisme. Implikasi dari hal ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya terorisme dan radikalisme serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegahnya.
2. Penguatan Pendidikan. Pendidikan di Indonesia harus terus ditingkatkan dan dipersiapkan secara lebih baik agar dapat membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya bela negara. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan nasional serta mengajarkan nilai-nilai kebangsaan.
3. Peningkatan Peran Organisasi. Peningkatan peran organisasi yang memiliki keterkaitan dengan bela negara dan pencegahan terorisme seperti TNI, Polri, BNPT, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya bela negara dan pencegahan terorisme kepada masyarakat menjadi implikasi penting lainnya.

Serta beberapa rekomendasi yang dapat diberikan penulis demi mencegah terorisme dengan berkembangnya paham-paham radikalisme yang berbahaya bagi kemanusiaan serta keamanan Nasional ialah sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi. Peningkatan edukasi melalui berbagai media seperti televisi, radio, internet, dan media sosial dapat menjadi rekomendasi untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya terorisme dan radikalisme serta mengajarkan nilai-nilai kebangsaan.
2. Pelibatan Masyarakat. Masyarakat harus lebih aktif terlibat dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme. Pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan bela negara dan pencegahan terorisme, seperti melalui program-program pelatihan dan seminar.
3. Peningkatan Pengawasan. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap organisasi-organisasi yang dapat menyebarkan pemikiran radikal dan terorisme. Pemerintah juga harus mengintensifkan kerjasama antara badan-badan terkait dalam mengatasi isu terorisme dan radikalisme.
4. Penguatan Hukum. Penguatan hukum dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku terorisme dan radikalisme harus terus ditingkatkan. Hal ini menjadi rekomendasi penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku terorisme dan radikalisme serta memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Harapan Kedepan

Harapan kedepan penulis bagi negara dan bangsa dalam membangun kesadaran bela negara adalah:

1. Terwujudnya Masyarakat yang Peduli Terhadap Keamanan Negara. Dengan meningkatnya kesadaran bela negara, masyarakat akan lebih peduli dan memperhatikan keamanan negara. Mereka akan menjadi lebih aware terhadap keberadaan kelompok-kelompok radikal yang dapat mengancam keamanan negara.
2. Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dan Radikalisme. Dengan kesadaran bela negara yang tinggi, masyarakat akan lebih aktif dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme. Mereka akan membantu pihak keamanan dalam memberikan informasi terkait dengan keberadaan kelompok radikal.
3. Tumbuhnya Generasi Muda yang Berbudaya Nasionalisme. Meningkatnya kesadaran bela negara juga akan membentuk generasi muda yang memiliki budaya nasionalisme yang kuat. Mereka akan lebih mencintai dan berkomitmen terhadap bangsa dan negara.
4. Terwujudnya Negara yang Kuat dan Stabil. Dengan meningkatnya kesadaran bela negara dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terorisme dan radikalisme, negara akan menjadi lebih kuat dan stabil. Hal ini akan berdampak positif pada kondisi sosial dan politik di Indonesia.
5. Menjadikan Indonesia Sebagai Contoh Negara yang Peduli Terhadap Keamanan. Harapan terbesar adalah Indonesia dapat menjadi contoh negara yang peduli terhadap keamanan negara dan berkomitmen dalam membangun kesadaran bela negara. Dengan demikian, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini mampu menjaga keamanan dan stabilitas negara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. Z., & Murniarti, E. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 37-44.
- Azani, E. M., & Saputra, A. S. (2019). Deteksi dan Penanganan Dini Terorisme dan Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Global*, 4(2), 122-131.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (n.d.). Profil BNPT. Diakses pada 13 Maret 2023, dari <https://www.bnpt.go.id/profil/>
- Borum, R. (2014). Understanding terrorist psychology. In J. L. T. T. C. Victoroff (Ed.), *The psychology of terrorism: Four volume set* (Vol. 1, pp. 23-52). Praeger.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications
- Eaton, M. (2015). *The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution*. Saqi Books.
- Endro, A. S. (2019). Penguatan Kesadaran Bela Negara sebagai Upaya Menangkal Terorisme dan Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Politik dan Keamanan*, 7(2), 144-156
- Hafez, M. M. (2007). Suicide terrorism in Iraq: A preliminary assessment of the quantitative data and documentary evidence. *Studies in Conflict & Terrorism*, 30(10), 857-870.
- Hartono, E. & Adi, F. (2019). Pendidikan nilai-nilai kebangsaan dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap sikap bela negara siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(1), 1-9.
- Karaca, S. S., & Arslan, M. (2021). Radicalism in the name of religion: Reasons and consequences. *Journal of Human Sciences*, 18(1), 98-115.
- Rifa'i, M. (2021). *Kesadaran Bela Negara dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme yang Mengarah pada Terorisme*. Skripsi. Universitas Negeri Malang.
- Sedgwick, M. (2010). The concept of radicalization as a source of confusion. *Terrorism and Political Violence*, 22(4), 479-494.
- Sihombing, M. (2017). Pembentukan Komunitas Bela Negara untuk Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 13(1), 77-88.

- Suhartono, E. (2016). Penguatan karakter bangsa melalui pembentukan kesadaran bela negara pada generasi muda. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Keagamaan*, 1(1), 61-70.
- Sulaiman, A., & Budiharto, T. (2019). Peran Media Sosial Dalam Membangun Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 20(1), 54-67.
- Triwiyanto, A. (2015). Pendidikan Karakter dalam Membangun Kesadaran Bela Negara. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(2), 129-138.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
- Warsono, H. (2018). Pendidikan Kebangsaan. Kencana Prenada Media Group.
- Wijayanto, A., & Riyadi, R. (2019). Pendidikan karakter dalam membangun kesadaran bela negara di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 155-166.
- Wiktorowicz, Q. (2004). *Radical Islam rising: Muslim extremism in the West*. Rowman & Littlefield.
- Yuliadi, R. M., & Rahayu, T. (2020). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa untuk Menghadapi Ancaman Terorisme dan Radikalisme. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 195-203.
- Undang-Undang No. 5 tahun 2018.
- Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 .
- Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.